BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Outsourcing merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat perusahaan tersebut menyerahkan sebagian aktivitas mereka kepada pihak luar (*outside provider*). Siklus akomodasi ini biasanya dinyatakan sebagai kontrak kerjasama yang juga berisi hak dan komitmen kedua pemain. Perkumpulan yang merupakan pemasok eksternal untuk situasi ini memiliki situasi yang sama dengan organisasi, namun tidak ditempatkan sebagai atasan atau bawahan. *Outsourcing* juga memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang dalam pekerjaan yang tidak dapat di selesaikan oleh perusahaan tersebut. Kondisi ini mungkin sulit untuk dihindari, karena tujuan mendasar dalam melakukan rethinking adalah untuk mengurangi biaya pembuatan. Praktik *outsourcing* saat ini juga mendapat banyak analisis, karena selama ini dianggap lebih negatif bagi buruh atau pekerja. Karena hubungan usaha yang terjadi pada umumnya dapat berupa hubungan kerja yang tidak kekal atau berwibawa (PKWT & PKWTT), kompensasi yang lebih rendah, tidak adanya pensiun yang didukung pemerintah, tidak ada stabilitas profesional dan tidak ada jaminan kemajuan vokasi dan sebagainya. fakta benar-benar menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu yang disebut praktik *outsourcing* telah membuat spesialis atau pekerja putus asa dan membuat hubungan mekanis jauh lebih kabur.¹

Kondisi ini bisa dikatakan sulit untuk disingkirkan, karena proses outsourcing yang mendasari dalam melakukan reevaluasi adalah untuk menekan biaya pembuatan. Wajar saja jika persoalan-persoalan yang muncul dalam kerangka kerja *outsourcing* tidak dapat diselesaikan, mengingat jika dilihat dari situasi yang tidak konsisten antara buruh dan manajer, tugas negara diharapkan untuk memastikan para spesialis melalui undang-undang. atau pedoman, khususnya UU Ketenagakerjaan yang lebih konkrit dalam mengkaji ulang pengaturan kerja. Selanjutnya, yang lebih mencirikan hak dan komitmen antara tenaga ahli/pekerja dan pelaku usaha, hal ini untuk mewujudkan keselarasan antara tenaga ahli/pekerja dan pelaku usaha serta untuk mencapai tujuan negara yaitu menjamin kehidupan yang baik bagi setiap penduduk. Penggunaan jasa tenaga kerja *outsourcing* memang sudah tidak asing lagi apalagi dalam dunia usaha. Tetapi tetap saja tidak semua orang paham tentang peraturan maupun sanksi apa yang terjadi apabila menggunakan jasa tenaga kerja maupun menjadi jasa tenaga kerja tersebut. Biasanya bidang dimana ditinjau ulang pemanfaatannya adalah bidang administrasi keselamatan seperti keamanan, administrasi kebersihan hingga pekerja di area bundling. Reevaluasi pada dasarnya adalah sebuah gerakan pembelian, khususnya tindakan pembelian administrasi dengan tujuan vital jangka panjang. Salah satu tujuan penting dari evaluasi ulang adalah untuk membangun efektivitas organisasi dengan mengurangi biaya kerja. Oleh karena itu, berbagai jenis evaluasi ulang muncul sebagai pengganti perekrutan perwakilan yang bertahan lama dan penuh waktu

¹ <https://www.jojonomic.com/blog/outsourcing/>

dengan pekerja sementara dan pemeliharaan rendah, perwakilan kontrak atau struktur yang berbeda di mana perwakilan mendapatkan keuntungan tidak langsung atau kurang.

Di Indonesia banyak permasalahan yang menyangkut kepada *outsourcing*. **Pertama**, permasalahan umum yang sering terjadi ialah adanya oknum yang sering melanggar peraturan perundang-undangan tentang *outsourcing*. Pelanggaran tersebut bisa datang dari perusahaan yang menggunakan jasa *outsourcing* atau bisa juga dari sisi perusahaan yang menyelenggarakan *outsourcing*. Misalnya, adanya perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan nya sesuai dengan UMR (Upaya Minimum Regional), tidak memberikan tunjangan yang sesuai, tidak mengikutkan karyawan nya dalam daftar BPJS. **Kedua**, kesalahan yang sering terjadi ialah minim nya pengawasan atau dengan kata lain kurang tegas nya pemerintah dalam memberikan tindakan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Misalnya, adanya jumlah karyawan yang lebih banyak dari pada jumlah pengawas nya, ditambah lagi anggaran nya tidak tersedia dan tidak adanya transportasi. ²

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk *Outsourcing* di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana Pengaruh Diterapkannya Sistem Kerja *Outsourcing* di Indonesia?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja *Outsourcing* Terhadap Putusan : No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk *Outsourcing* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh diterapkannya Sistem Kerja *Outsourcing* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja *Outsourcing* terhadap Putusan : No. 191/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Kajian ini dilakukan supaya memberikan keuntungan langsung atau tidak langsung bagi para pembacanya. Keuntungan dari kajian ini antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi hukum dibidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan khususnya untuk mengetahui hal-hal yang berkait dengan Sistem Kerja *Outsourcing*

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

² <https://www.jojonomic.com/blog/outsourcing/>

Bisa meningkatkan wawasan serta gambaran mengenai Sistem Kerja *Outsourcing*

b. Bagi Masyarakat

Bisa menjadi informasi untuk khalayak luas tentang Sistem Kerja *Outsourcing* di Indonesia

c. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengoreksi kembali peraturan mengenai Ketenagakerjaan khususnya dalam hal Sistem Kerja *Outsourcing* agar tidak terjadi lagi permasalahan dalam hal Sistem Kerja *Outsourcing*.

1.5 Kerangka Teori & Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sistem hipotetis analisis berkenaan dengan masalah dimana akan dipertimbangkan, yang menggambarkan hubungan antara ide-ide atau faktor-faktor yang akan diperiksa.

1.5.2 Kerangka Konseptual

a. Perlindungan adalah memberikan jaminan atas kebebasan dasar yang dilanggar oleh orang lain. Jaminan semacam ini diberikan kepada masyarakat setempat agar mereka bisa menghormati setiap hak atau kelengkapan yang diberikan oleh hukum. Jaminan hukum adalah segala macam upaya hukum dimana dilakukan oleh hukum harus memberi. Memerlukan otorisasi untuk menyediakan asuransi yang valid. Saya merasa jika segala sesuatu di dunia ini baik-baik saja, baik secara intelektual maupun murni dari segala rintangan dan bahaya dihadapi.³

b. Karyawan outsourcing adalah perwakilan dimana bekerja pada suatu organisasi untuk jangka waktu tertentu yang bergantung pada suatu kesepakatan atau kesepakatan, dimana juga bisa disebut pada PKWT, yaitu suatu pengertian kerja dimana bergantung pada jangka waktu yang diadakan untuk suatu batas waktu. dari 2 tahun dan harus diregangkan selama satu tahun. kali untuk waktu terbesar 1 tahun⁴.

c. Hukum adalah rangkaian peraturan yang isinya merupakan perintah atau larangan dimana bersifat memaksa hingga terciptanya kondisi kondusif serta terdapat juga ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggarnya.

³ Soetiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta:UNS,2004), hlm. 3

⁴ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta:Deepublish, 2015), hal.9